

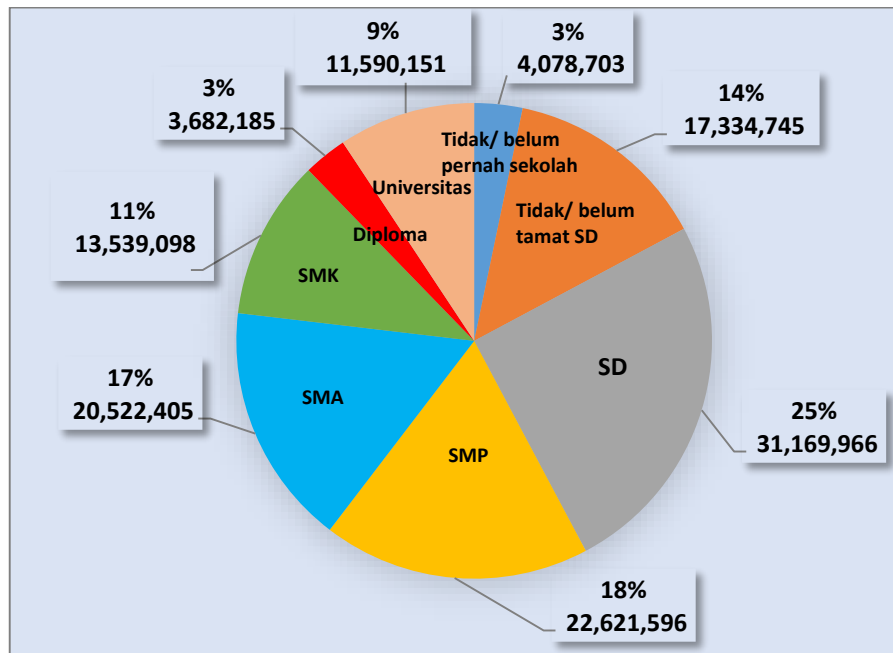
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan kesempatan dan lapangan kerja sehingga angkatan kerja di suatu daerah dapat terserap secara maksimal. Target pertumbuhan ekonomi yang disasar oleh pemerintah akan tercapai apabila pertumbuhan pada sektor industri dapat mencapai target sesuai dengan yang diinginkan. Upaya untuk mendorong pertumbuhan pada sektor industri tersebut adalah dengan pemenuhan dan dukungan dari tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri.

Kesenjangan kompetensi menjadi permasalahan yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia saat ini. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Hanif Dhakiri bahwa terdapat tiga masalah yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia yaitu: (1) Kelompok angkatan kerja yang kemampuan dan pendidikannya tidak cocok dengan kebutuhan dunia industri; (2) Kelompok angkatan kerja yang memiliki kemampuan di bawah yang diharapkan oleh dunia industri; dan (3) Tingginya kelompok pekerja miskin berjumlah 60 persen dari 128 juta angkatan kerja apabila masuk dalam industri padat karya tidak memiliki karir (Irawan, 2018). Pernyataan tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional.



(Sumber: BPS Nasional Tahun 2017)

Gambar 1. Data Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Lulusan

Pada gambar 1 menunjukkan bahwa tenaga kerja di Indonesia didominasi oleh lulusan SD dan SMP yang bisa dikatakan kurangnya kualitas tenaga kerja karena belum memiliki kompetensi kerja. Selain kurangnya kualitas tenaga kerja, kesenjangan kompetensi menjadi sebab terjadinya ketidaksesuaian antara *supply* dan *demand* tenaga kerja.

Sekolah Menengah Kejuruan sebagai lembaga pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk mampu terjun langsung di dunia kerja setelah lulus atau mencetak lulusan yang siap bekerja. SMK dipersiapkan untuk mencetak tenaga kerja terampil yang siap bekerja dengan berbagai kompetensi dan mampu mengikuti perkembangan IPTEK. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 15 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu”. Sampai

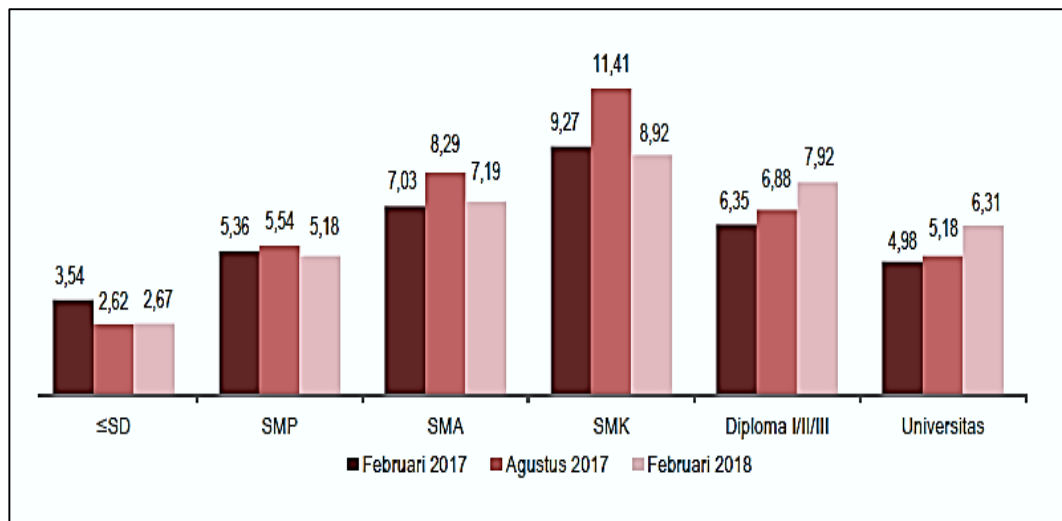
saat ini di Indonesia terdapat 9 bidang keahlian dengan 142 program keahlian yang ditawarkan oleh SMK. Berbagai program keahlian yang ditawarkan oleh SMK diharapkan dapat menjadi solusi bagi lulusannya untuk mengisi dunia industri yang memiliki berbagai jenis bidang produksi. Lulusan yang memiliki keterampilan berpeluang tinggi untuk bekerja dan produktif, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Akan tetapi, realita yang terjadi adalah kesenjangan antara *supply* dan *demand* tenaga kerja akibat langsung dari perencanaan pendidikan yang tidak berorientasi pada realitas yang terjadi dalam dunia kerja. Perencanaan pendidikan yang tidak mengikuti perubahan dan lepas dari konteks kebutuhan dunia kerja, menyebabkan menumpuknya lulusan program pendidikan pada tingkat tertentu. Kesenjangan antara *supply* dan *demand* lulusan SMK dengan peluang kebutuhan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kesenjangan *supply and demand* lulusan SMK dengan peluang kebutuhan tenaga kerja

No	Bidang Keahlian	Lulusan SMK 2016	Peluang Kebutuhan Tenaga Kerja	Kelebihan (+)/ Kekurangan (-)
1	Teknologi dan Rekyasa	441.561	611.644	170.083
2	Energi dan Pertambangan	3.486	27.008	23.522
3	Teknologi informasi dan Komunikasi	277.545	327.813	50.268
4	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	60.944	68.245	7.301
5	Agribisnis dan Argoteknologi	52.319	445.792	393.473
6	Kemaritiman	17.249	3.364.297	3.347.048
7	Bisnis dan Manajemen	384.954	119.255	-229.699
8	Pariwisata	82.171	707.600	625.429
9	Seni dan Industri Kreatif	12.017	88.133	76.116
TOTAL		1.296.246	5.759.787	4.463.541

(Sumber: Hadam et.al, 2017: 8)

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pasokan tenaga kerja pada sektor-sektor tertentu dan juga sebaliknya, peluang kebutuhan tenaga kerja pada sektor-sektor lainnya belum dapat terpenuhi. Kelebihan peluang kebutuhan tenaga kerja menjadi tren positif untuk lulusan SMK supaya dapat terserap secara maksimal di dunia kerja. Akan tetapi, lulusan SMK justru menyumbang angka pengangguran tertinggi di antara tingkat pendidikan lainnya. Hal ini berdasarkan data BPS Nasional Tahun 2018.



(Sumber: BPS Nasional Tahun 2018)

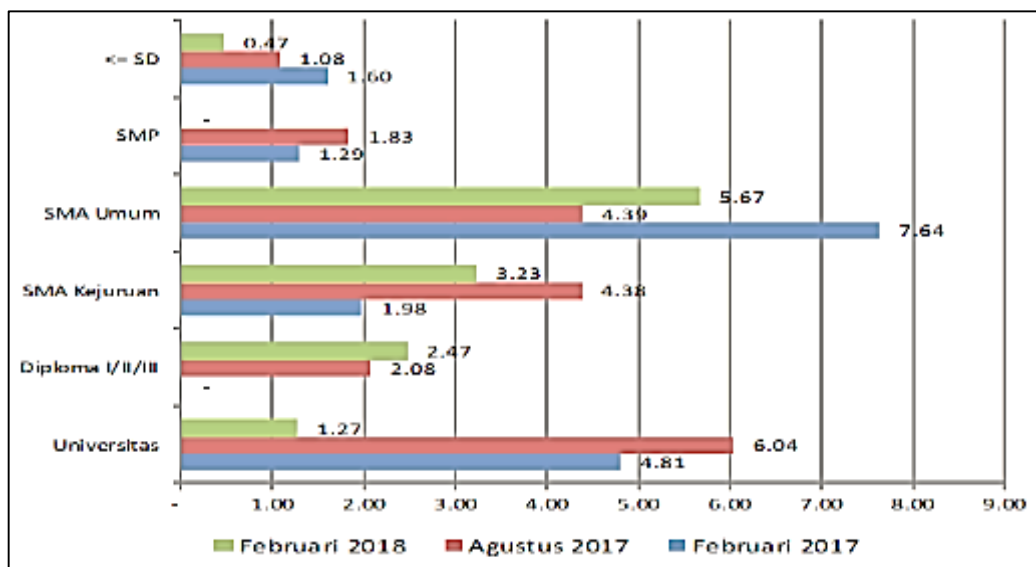
Gambar 2. TPT Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Februari 2017-Februari 2018

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi mengenai penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Pengangguran di Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan, TPT tingkat pendidikan SMK tertinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 8,92 persen. Pada tingkat pendidikan SMK masih banyak penawaran tenaga kerja yang belum terserap. Merujuk pada kenyataan di atas menjadi pertanyaan sendiri mengapa lulusan SMK banyak yang belum terserap di industri atau dunia usaha.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa pendidikan menengah tidak hanya mencetak lulusan yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi namun juga mempersiapkan lulusan SMK yang memiliki keterampilan memadai untuk menjadi tenaga kerja siap pakai dan terampil (Baswedan, 2015: 9). Melalui Instruksi Presiden (Inpres No 9 Tahun 2016), menugaskan Kemendikbud untuk membuat peta jalan pengembangan SMK, menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan (*link and match*), kemudian pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan, standarisasi sarana dan prasarana utama, serta peningkatan akses sertifikasi kompetensi. Namun sampai saat ini tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dikarenakan sistem penyelenggaraan pendidikan masih belum sesuai dan sejalan dengan definisi peserta didik yang dijelaskan dalam pasal 15 Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Kurang maksimalnya pencapaian tujuan pendidikan merupakan akibat dari sistem pendidikan yang tidak memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan potensi, bakat dan minatnya. Akibatnya masih banyak lulusan SMK yang tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya dan menyebabkan pengangguran.

Menurut Sekretaris Disnakertrans Daerah Istimewa Yogyakarta (dalam Wardhani, 2018), Sriyati mengatakan kurangnya kesempatan kerja dan kualitas SDM menjadi faktor belum terserapnya tenaga kerja secara maksimal. Hal ini membuat masalah pengangguran menjadi sulit untuk diatasi oleh pemerintah DIY.

Fakta ini dapat dilihat berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. Angkatan kerja di DIY pada Februari 2018 sebanyak 2,142 juta orang dengan TPT DIY sebesar 3,06 persen, mengalami peningkatan 0,22 persen dibanding TPT Februari 2017 sebesar 2,84 persen.



(Sumber: BPS Provinsi DIY 2018)

Gambar 3. Perkembangan TPT Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, D.I. Yogyakarta Februari 2017 – Februari 2018

Jika dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan angkatan kerjanya, pada Februari 2018 TPT untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 5,67 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 3,23 persen. Data tersebut memberikan informasi bahwa lulusan SMK yang telah dibekali kompetensi keahlian untuk siap terjun langsung di dunia kerja, justru memberikan sumbangan yang besar terhadap tingkat jumlah pengangguran. Penyebab peningkatan TPT DIY diantaranya karena penduduk yang telah menyelesaikan pendidikannya selama setahun terakhir masih banyak yang belum terserap dalam pasar kerja. Untuk itu,

berbagai langkah dilakukan oleh pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kekurangan yang dihadapi agar dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan tidak salah sasaran dimana setidaknya terdapat tiga parameter yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pendidikan kejuruan, yaitu pengangguran dan keterserapan lulusan SMK, *mismatch* kualifikasi lulusan SMK dengan pekerjaan, dan kelebihan pasokan lulusan SMK.

Era revolusi industri 4.0 menghadirkan tantangan baru dalam berbagai sektor kehidupan, terutama pada sektor industri meskipun masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Konselir Jerman, Angela Merkel (2014) berpendapat bahwa Industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Revolusi industri 4.0 menciptakan sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Di era ini, tenaga kerja diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat dengan adanya teknologi digital yang diterapkan dalam proses produksi. Selain itu, revolusi industri 4.0 berdampak negatif pada penciptaan lapangan kerja. Menurut Dwikorika Karnawati (2017), revolusi industri 4.0 dalam lima tahun mendatang akan menghapus 35% jenis pekerjaan dan bahkan pada 10 tahun yang akan datang bertambah menjadi 75% jenis pekerjaan yang akan hilang. Prasetyo (2017: 22) menambahkan bahwa revolusi industri 4.0 menyimpan berbagai dampak negatif, diantaranya ancaman pengangguran akibat otomatisasi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengantisipasi tantangan revolusi industri 4.0 dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan perubahan-perubahan yang

terjadi. Menurut Airlangga Hartarto (2016: 8), peningkatan kualitas SDM di era revolusi industri 4.0 dengan merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada STEAM (*Science, Technology, Engineering, the Arts, dan Mathematics*), menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri di masa mendatang, dan bekerja sama dengan pelaku industri dan pemerintah asing untuk meningkatkan kualitas sekolah kejuruan sekaligus memperbaiki program mobilitas tenaga kerja global.

Permasalahan lain yang menyebabkan terjadinya tingkat pengangguran bagi lulusan SMK adalah adanya perbedaan Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI) dengan kebutuhan di dunia kerja. Sedangkan penilaian akhir dalam menentukan capaian kompetensi siswa SMK dilaksanakan dalam bentuk Uji Kompetensi Keahlian (UKK) yang mengacu pada SKKNI. Hasil UKK dari peserta didik akan menjadi indikator ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan pemberian sertifikat kompetensi, sedangkan bagi industri akan dijadikan sebagai informasi atas kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja karena industri akan lebih memilih untuk mempekerjakan tenaga kerja yang bersertifikat sesuai kompetensinya (Direktur Pembinaan SMK, 2018).

Lulusan SMK yang kompeten akan mampu terserap di dunia industri. Siswa SMK dinyatakan lulus ketika memenuhi SKL, sedangkan tenaga kerja dinyatakan kompeten jika melaksanakan pekerjaan sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan memiliki sertifikat kompetensi. Oleh sebab itu, perlu diadakan penelitian mengenai keterserapan dan relevansi kompetensi lulusan SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan industri. Penelitian ini akan mengkaji

mengenai keterserapan dan relevansi kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja lulusan SMK Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dari latar belakang masalah adalah sebagai berikut:

1. Kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri masih menjadi masalah tenaga kerja di Indonesia.
2. Adanya kesenjangan *supply* dan *Demand* antara lulusan SMK dengan peluang kebutuhan tenaga kerja.
3. Kurang maksimalnya pencapaian tujuan pendidikan SMK dalam mencetak lulusan yang siap kerja dan dapat terserap di dunia kerja. Hal ini dikarenakan lulusan SMK memberikan sumbangan terhadap angka pengangguran terhadap tingkat jumlah pengangguran.
4. Belum lengkapnya data keterserapan lulusan SMK di suatu wilayah, khususnya di DIY.
5. Belum adanya informasi mengenai tingkat relevansi kompetensi keahlian yang dimiliki lulusan SMK dengan bidang pekerjaan yang dibutuhkan di dunia kerja.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang cukup luas, maka perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dibatasi pada keterserapan lulusan SMK Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018 dan tingkat relevansi

kompetensi lulusan SMK Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja bidang pemesinan di D.I. Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian sebagaimana diungkapkan di atas, perumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat keterserapan lulusan SMK Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tingkat kebutuhan kompetensi lulusan SMK Teknik Pemesinan di industri bidang pemesinan di DIY?
3. Bagaimana tingkat relevansi antara kompetensi lulusan SMK Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan dengan kompetensi yang dibutuhkan di industri bidang pemesinan di DIY?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana diungkapkan di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi tingkat keterserapan lulusan SMK Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan di Kota Yogyakarta,
2. Mendapatkan informasi tingkat kebutuhan kompetensi lulusan SMK Teknik Pemesinan di industri bidang pemesinan di DIY, dan
3. Mendapatkan informasi tingkat relevansi antara kompetensi lulusan SMK Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan dengan kompetensi yang dibutuhkan di industri bidang pemesinan di DIY.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pihak SMK
 - a. Tingkat keterserapan lulusan SMK Kompetensi Teknik Pemesinan menjadi refleksi dan bahan evaluasi sekolah dalam proses penyaluran lulusan ke dunia kerja.
 - b. Tingkat kebutuhan kompetensi teknik pemesinan di dunia kerja dapat dijadikan acuan untuk proses pembelajaran dan pelatihan di sekolah
 - c. Tingkat relevansi kompetensi teknik pemesinan menjadi bahan acuan dalam pengembangan kurikulum di sekolah
2. Bagi pihak Industri
 - a. Tingkat kebutuhan kompetensi teknik pemesinan di dunia kerja dapat dijadikan bahan evaluasi untuk berkontribusi meningkatkan kualitas tenaga kerja yang kompeten.
 - b. Tingkat relevansi kompetensi kerja teknik pemesinan dapat dijadikan acuan untuk menjaga kesesuaian kompetensi sehingga menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di bidang keahliannya.
3. Bagi Dinas Pendidikan dan Perindustrian
 - a. Tingkat keterserapan lulusan SMK Kompetensi Teknik Pemesinan sebagai refleksi bagi keberhasilan pendidikan kejuruan dalam mengurangi tingkat pengangguran angkatan kerja.
 - b. Tingkat kebutuhan dan relevansi kompetensi dapat dijadikan acuan dalam menentukan kebijakan atas masalah yang berkaitan dengan hubungan antara dunia kerja dan SMK selama ini.